WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka penetapan hasil analisa jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian nama jabatan;

b. bahwa untuk menyesuaikan uraian jabatan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Pelaksana pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kota Subulussalam (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2018tentang hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor22) diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 04 Maret 2020 M
9 Rajab1441 H

WALIKOTA KOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 05 Maret 2020 M
10 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 53

DAFTAR ISI

Halaman

I. ANALISIS JABATAN KEPALA DINAS

KEPALA DINAS 1

II. ANALISIS JABATAN BIDANG SEKRETARIAT

SEKRETARIS 7

1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 12
   a. Pengadministrasi Persuratan 18
   b. Pengadministrasi Kepegawaian 21
   c. Pengelola Barang Milik Negara 24
   d. Pengelola Disiplin Pegawai 27
   e. Pengemudi 30
2. KASUBBAG KEUANGAN PROGRAM DAN PELAPORAN 33
   a. Bendahara 38
   b. Pengolah Daftar Gaji 42
   c. Penyusun Laporan Keuangan 45
   d. Pengelola Program dan Laporan 48

III. ANALISIS JABATAN BIDANG PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH

1. KEPALA BIDANG PENGATURAN, PENGUASAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH 51
2. KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH 56
   a. Pengelola Data Landreform 61
   b. Pengelola Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanak Kritis 64
3. KEPALA SEKSI INVENTARISASI DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH 67
   a. Pengelola Data Penatagunaan Tanah 71
   b. Pengelola Data Pengendalian Pertanahan 74
   c. Pengelola Data Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis 77
4. KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PENDATAAN P4T 80
   a. Kartografer 84
   b. Pengadministrasi Pertanahan 87
   c. Pengelola Data dan Informasi Nilai Tanah 90

IV. ANALISIS JABATAN BIDANG PENGADAAN, PENANGANAN MASALAH TANAH, PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN PEMBINAAN .....

1. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PENANGANAN MASALAH TANAH, PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN PEMBINAAN 93